

MODUL

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN LEMBAGA PEMERINTAH
BAGI GURU SMK DALAM MENYIAPKAN TENAGA OPERATOR
KEUANGAN DI ERA DISRUPTIF
(MGMP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN)**

PROGRAM DOSEN WAJIB MENGABDI



Oleh:
M. Nordiansyah, SE., M.Ak., Ak., CA
(NIDN 0025118101)

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan syukur kepada Allah SWT, Modul Pengabdian Kepada Masyarakat Pelatihan Akuntansi Keuangan Lembaga Pemerintah bagi Guru SMK dalam menyiapkan tenaga operator keuangan di era disruptif (MGMP Provinsi Kalimantan Selatan) ini telah selesai disusun.

Modul ini membahas mengenai akuntansi pemerintahan di Indonesia yang dimulai dari regulasi terkait keuangan negara yang diterbitkan sebagai produk dari reformasi keuangan negara yang mengamankan instansi pemerintah untuk membuat laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Pembahasan dilanjutkan dengan mengulas mengenai standar akuntansi pemerintahan yang sudah mengalami perubahan dari PP nomor 24 tahun 2005 menjadi PP nomor 71 tahun 2010 serta bagaimana perkembangannya sehingga sampai dengan tahun 2021. Selanjutnya dibahas mengenai sistem akuntansi pemerintahan baik pusat maupun daerah. Pada bagian akhir modul, di simulasikan akuntansi yang terjadi pada SKPD sebagai latihan.

Kami menyadari bahwa modul ini masih terdapat banyak kekurangan. Kami sangat menghargai jika ada saran dan masukan dalam rangka penyempurnaan modul ini. Semoga modul ini bermanfaat bagi para peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan pembaca lainnya.

Banjarmasin, Agustus 2022
M. Nordiansyah, SE, M.Ak, Ak, CA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB 1. SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH.....	4
1. 1. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP)	4
1. 2. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD).....	7
BAB 2. SIMULASI AKUNTANSI SKPD	10
DAFTAR PUSTAKA.....	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Framework Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat	7
---	---

BAB 1. SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH

Standar Akuntansi Pemerintahan mendefinisikan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi pemerintah.

Sesuai level pemerintahan di Republik Indonesia, Sistem akuntansi pemerintahan di Indonesia terdiri atas sistem akuntansi pemerintah pusat dan sistem akuntansi pemerintah daerah.

Sistem akuntansi pemerintahan disebutkan dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 sebagai berikut:

Ayat (1) “Pemerintah menyusun Sistem Akuntansi Pemerintahan yang mengacu pada SAP”.

Ayat (2) “Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan”.

Ayat (3) “Sistem akuntansi pemerintahan pada pemerintah daerah diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota yang mengacu pada pedoman umum sistem akuntansi pemerintahan”.

1. 1. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP)

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) adalah sistem terpadu yang menggabungkan prosedur manual dengan proses elektronik dalam pengambilan data, pembukuan dan pelaporan semua transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas seluruh entitas Pemerintah Pusat.

Sistem akuntansi pemerintah pusat terdiridari 2 subsistem yaitu:

1. Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN)
2. Sistem Akuntansi Instansi (SAI)

1. Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN)

SA-BUN merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dan Pengguna Anggaran dari Bagian Anggaran Perhitungan dan Pembiayaan (BAPP).

Sistem akuntansi bendahara umum negara ini terdiri dari beberapa sub sistem:

1. Sistem Akuntansi Pusat (SiAP)
 - Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN)
 - Sistem Akuntansi Umum (SAU)
2. Sistem Akuntansi Utang Pemerintah dan Hibah (SA-UP&H)
3. Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (SA-IP)
4. Sistem Akuntansi Penerusan Pinjaman (SA-PP)
5. Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah (SA-TD)
6. Sistem Akuntansi Bagian Anggaran Perhitungan dan Pembiayaan (SA-BAPP)
7. Sistem Akuntansi Transaksi Khusus (SA-TK)
8. Sistem Akuntansi Badan Lainnya (SA-BL).

2. Sistem Akuntansi Instansi (SAI)

SAI merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembagadigunakan untuk keperluan internal organisasi disebut akuntansi manajemen dan yang ditujukan untuk pihak luar dikenal sebagai akuntansi keuangan.

Sistem akuntansi instansi terdiri dari sub sistem:

1. Sistem Akuntansi Keuangan (SAK)
 - Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SA--UAKPA);

- Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (SA-UAPPA-W);
 - Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (SA-UAPPA-E1); dan
 - Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (SA-UAPA)
2. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN)
- Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (SA-UAKPB);
 - Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (SA-UAPPB-W);
 - Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (SA-UAPPB-E1); dan
 - Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pengguna Barang (SA-UAPB).

Ruang Lingkup Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP)

- Lembaga Tinggi Negara
- Lembaga-Lembaga Eksekutif
- Pemda yang sumber dananya dari APBN

Tidak termasuk ruang lingkup Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP)

- Pemerintah Daerah
- Lembaga Keuangan Negara
- BUMN/BUMD

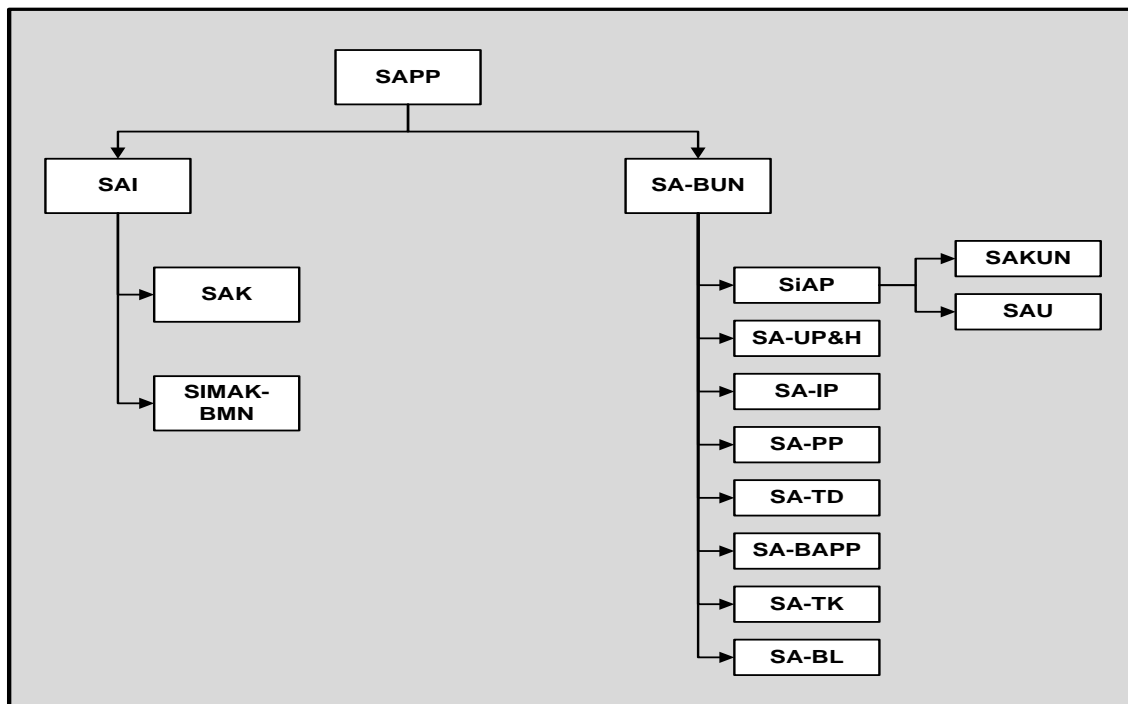
Tujuan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP)

- Menjaga aset Pemerintah Pusat dan instansi-instansinya melalui pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan standar dan praktik akuntansi yang diterima secara umum;
- Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan Pemerintah Pusat, baik secara nasional maupun instansi yang berguna

sebagai dasar penilaian kinerja, untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas;

- Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan Pemerintah Pusat secara keseluruhan;
- Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien.

Framework Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. *Framework* Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat

1. 2. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) merupakan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan yang akurat di lingkungan organisasi pemerintahan daerah (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013).

Sedangkan, Abdul Halim mendefinisikan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta laporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan dalam prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum. Deddi Nordiawan menyatakan bahwa SAPD adalah serangkaian prosedur, mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

STRUKTUR SAPD

Dalam konstruksi keuangan daerah, terdapat dua jenis transaksi, yaitu:

1. Transaksi pada level Satuan Kerja (SKPD dan SKPKD)

Transaksi pada level satuan kerja (SKPD dan SKPKD) terdiri atas transaksi pendapatan pajak, retribusi, lain-lain pendapatan yang sah, belanja pegawai, barang dan jasa maupun belanja modal.

2. Transaksi pada level Pemda

Transaksi pada level pemda terdiri dari pendapatan dana perimbangan, lain-lain pendapatan yang sah, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pembiayaan (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan).

Dengan dasar di atas, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dibagi menjadi dua sub sistem, yaitu:

1. Akuntansi Satuan Kerja
2. Akuntansi PPKD

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan Laporan Konsolidasi dari dua sub sistem tersebut. Konsep Konsolidasi menggunakan prinsip “*Home Office – Branch Office*”.

SAPD pada entitas akuntansi dilaksanakan dalam rangkaian prosedur identifikasi transaksi, teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, serta penyusunan laporan keuangan entitas akuntansi berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

SAPD pada entitas pelaporan dilaksanakan dalam rangkaian prosedur pencatatan jurnal penyesuaian konsolidasi, kertas kerja konsolidasi, dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB 2. SIMULASI AKUNTANSI SKPD

Bab ini membahas mengenai simulasi akuntansi pada SKPD Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai latihan untuk memahami bagaimana transaksi yang terjadi pada SKPD dalam suatu pemerintahan daerah. Transaksi yang terjadi merupakan transaksi-transaksi terjadi di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pada pemerintah daerah secara umum. Dari contoh-contoh transaksi, dibahas bagaimana melakukan pembukuan sampai menyusun laporan keuangan pada SKPD.

Berikut ini disajikan simulasi akuntansi kasus pada SKPD Pemerintah Daerah.

1. NERACA AWAL SKPD

**NERACA
SKPD A
01 Januari 2019**

dalam Rp.

	D		K
Piutang Pajak Daerah	3.000.000	Kewajiban	-
Persediaan Bahan Pakai Habis	5.000.000		
Tanah untuk Bangunan Gedung	100.000.000		
Alat Angkutan Darat Bermotor	42.000.000	Ekuitas	362.500.000
Alat Kantor	6.000.000		
Alat Rumah Tangga	4.000.000		
Komputer	5.000.000		
Meja dan Kursi Kerja	8.000.000		
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(13.000.000)		
Bangunan Gedung Tempat Kerja	150.000.000		
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	75.000.000		
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(22.500.000)		
JUMLAH	362.500.000	JUMLAH	362.500.000

TRANSAKSI OPERASI SKPD A		
No	Tanggal	URAIAN
1	01/03/2019	Bendahara Penerimaan SKPD A menerima Kas untuk pembayaran piutang pajak daerah yang ditetapkan pada tahun lalu. Jumlah penerimaan adalah Rp.2.000.000,- untuk Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp.1.000.000,-
2	02/03/2019	Bendahara Penerimaan SKPD A menyetor kas sebesar Rp.3.000.000,- ke Kas Daerah dari penerimaan Pajak sebelumnya
3	03/03/2019	Bendahara Pengeluaran SKPD A menerima SP2D UP dari BUD sebesar Rp.3.000.000,- sebagai uang persediaan yang akan digunakan untuk pengeluaran sehari-hari SKPD A
4	08/03/2019	Diterima tagihan dari perusahaan utilitas : a. Tagihan Listrik : Rp.800.000,- b. Tagihan Air : Rp. 200.000,- c. Tagihan Telepon : Rp. 600.000,-
5	09/03/2019	Bendahara Pengeluaran membayar tagihan yang diterima tanggal 8 Maret 2019 menggunakan Uang Persediaan (UP) a. Tagihan Listrik : Rp.800.000,- b. Tagihan Air : Rp. 200.000,- c. Tagihan Telepon : Rp. 600.000,-
6	15/03/2019	Bendahara Pengeluaran SKPD A menggunakan UP untuk membeli alat tulis kantor, meterai, isi tabung gas, bahan kebersihan sebesar Rp.1.250.000,-
7	31/03/2019	Bendahara Pengeluaran SKPD A mempertanggungjawabkan UP yang digunakan sebesar Rp. 2.850.000,-. Pada saat yang sama menerima SP2D GU (Ganti Uang) dari BUD sebagai pengganti uang persediaan yang telah digunakan sebesar Rp.2.850.000,-
8	01/04/2019	Dilakukan pembayaran Belanja Pegawai berupa Gaji Pokok dan Tunjangan keluarga dengan SP2D LS sebesar Rp.25.000.000,- yang diterima dari BUD. Atas pembayaran tersebut BUD memotong PPh Pasal 21 atas gaji tersebut sebesar 5%
9	05/04/2019	Bendahara Pengeluaran SKPD A menggunakan UP untuk pembayaran perjalanan dinas pegawai sebesar Rp.2.300.000,-
10	10/05/2019	SKPD A melakukan perawatan kendaraan dan pemeliharaan gedung. Tagihan yang diterima atas perawatan kendaraan dan pemeliharaan gedung adalah masing-masing Rp.1.200.000,- dan Rp.1.000.000,-
11	12/06/2019	Dilakukan pembayaran atas tagihan perawatan kendaraan dan pemeliharaan gedung dengan menggunakan SP2D LS
12	15/07/2019	Dilakukan pengeluaran untuk membeli komputer dengan SP2D LS yang diterima dari BUD sebesar Rp.16.500.000,-. Jumlah tersebut sudah termasuk PPN 10%. BUD memotong PPN 10% dan PPh Pasal 22 sebesar 1.5%
13	18/08/2019	Dilakukan pengeluaran untuk pembelian Kendaraan Operasional dengan SP2D LS sebesar Rp.55.000.000,- Jumlah tersebut sudah termasuk PPN 10%. BUD memotong PPN 10% dan PPh Pasal 22 sebesar 1.5%

TRANSAKSI OPERASI SKPD A		
No	Tanggal	URAIAN
14	20/09/2019	Dibuat Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah untuk masing-masing : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) : Rp.20.000.000,- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) : Rp.10.000.000,- Pajak Penerangan Jalan (PPJ) : Rp.15.000.000,-
15	10/10/2019	Diterima kas oleh bendahara penerimaan SKPD A dari wajib pajak yang melakukan penghitungan sendiri untuk pembayaran pajak hotel Rp.8.500.000,- dan pajak restoran sebesar Rp.7.500.000,-
16	11/10/2019	Bendahara penerimaan SKPD A menyetor kas sebesar Rp. 16.000.000,- ke kas daerah yang berasal dari penerimaan pajak sebelumnya.
17	20/10/2019	Diterima kas sebesar Rp.41.000.000,- oleh Bendahara Penerimaan SKPD A dari Wajib Pajak atas Pajak Daerah yang sudah ditetapkan sebelumnya, dengan rincian : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) : Rp.16.000.000,- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) : Rp.10.000.000,- Pajak Penerangan Jalan (PPJ) : Rp.15.000.000,-
18	21/10/2019	Bendahara penerimaan SKPD A menyetor kas sebesar Rp. 41.000.000,- ke kas daerah yang berasal dari penerimaan pajak sebelumnya.
19	05/11/2019	Diterima pembayaran di muka untuk pajak reklame sebesar Rp.7.000.000,-

DATA PENYESUAIAN

- 1 Persediaan bahan pakai habis yang masih tersisa sebesar Rp. 4.500.000,-
- 2 Piutang Pajak Daerah diperkirakan tidak dapat ditagih sebesar Rp.200.000,-
- 3 Penyusutan :
 - a. Alat angkutan darat bermotor Rp8.200.000
 - b. Alat Kantor Rp600.000
 - c. Alat rumah tangga Rp400.000
 - d. Komputer Rp2.000.000
 - e. Meja dan kursi Rp800.000
 - f. Bangunan gedung tempat kerja Rp7.500.000
 - g. Bangunan gedung tempat tinggal Rp3.750.000
- 4 Pajak reklame diterima dimuka yang sudah menjadi hak pemerintah adalah Rp.4.000.000,-

2.1. JURNAL

Jurnal adalah catatan atas transaksi, berdasarkan transaksi yang terjadi, dibuat jurnal pada SKPD yang meliputi:

1. Jurnal Finansial

Jurnal finansial merupakan jurnal untuk pencatatan transaksi yang dilaporkan pada laporan operasional dan neraca. Karena itu jurnal finansial juga disebut Jurnal LO/Neraca. Jurnal finansial dibuat berdasarkan basis akrual.

2. Jurnal Pelaksanaan Anggaran

Jurnal Pelaksanaan Anggaran merupakan jurnal untuk pencatatan transaksi yang dilaporkan pada laporan realisasi anggaran. Karena itu jurnal pelaksanaan anggaran juga sering disebut sebagai jurnal LRA. Jurnal pelaksanaan anggaran dibuat berdasarkan basis kas.

Berikut adalah jurnal untuk mencatat transaksi-transaksi yang terjadi pada SKPD A, baik jurnal finansial maupun jurnal pelaksanaan anggaran, pada pembukuan SKPD A sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	D Rp.	K Rp.
1	01/03/2019	Bendahara Penerimaan SKPD A menerima Kas untuk pembayaran piutang pajak daerah yang ditetapkan pada tahun lalu. Jumlah penerimaan adalah Rp.2.000.000,- untuk Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp.1.000.000,- JURNAL FINANSIAL Kas di Bendahara Penerimaan Piutang Pajak Daerah JURNAL PELAKSANAAN ANGGARAN Perubahan SAL Pendapatan PBB-P2 LRA Pendapatan Pajak Penerangan Jalan-LRA	3.000.000 3.000.000	 3.000.000 2.000.000 1.000.000
2	02/03/2019	Bendahara Penerimaan SKPD A menyetor kas sebesar Rp.3.000.000,- ke Kas Daerah dari penerimaan Pajak sebelumnya JURNAL FINANSIAL RK PPKD Kas di Bendahara Penerimaan JURNAL PELAKSANAAN ANGGARAN Tidak Ada	3.000.000	3.000.000
3	03/03/2019	Bendahara Pengeluaran SKPD A menerima SP2D UP dari BUD sebesar Rp.3.000.000,- sebagai uang persediaan yang akan digunakan untuk pengeluaran sehari-hari SKPD A JURNAL FINANSIAL Kas di Bendahara Pengeluaran RK PPKD	3.000.000	3.000.000

No	Tanggal	Uraian	D Rp.	K Rp.
		JURNAL PELAKSANAAN ANGGARAN Tidak Ada		
4	08/03/2019	Diterima tagihan dari perusahaan utilitas : a. Tagihan Listrik : Rp.800.000,- b. Tagihan Air : Rp. 200.000,- c. Tagihan Telepon : Rp. 600.000,- JURNAL FINANSIAL Beban Jasa Kantor Utang Belanja Barang dan Jasa JURNAL PELAKSANAAN ANGGARAN Tidak Ada	1.600.000	1.600.000
5	09/03/2019	Bendahara Pengeluaran membayar tagihan yang diterima tanggal 8 Maret 2019 menggunakan Uang Persediaan (UP) a. Tagihan Listrik : Rp.800.000,- b. Tagihan Air : Rp. 200.000,- c. Tagihan Telepon : Rp. 600.000,- JURNAL FINANSIAL Utang Belanja Barang dan Jasa Kas di Bendahara Pengeluaran JURNAL PELAKSANAAN ANGGARAN Belanja Jasa Kantor Perubahan SAL	1.600.000 1.600.000	1.600.000 1.600.000
6	15/03/2019	Bendahara Pengeluaran SKPD A menggunakan UP untuk membeli alat tulis kantor, meterai, isi tabung gas, bahan kebersihan sebesar Rp.1.250.000,- JURNAL FINANSIAL Beban Bahan Pakai Habis Kas di Bendahara Pengeluaran	1.250.000	1.250.000
		JURNAL PELAKSANAAN ANGGARAN Belanja Bahan Pakai Habis Perubahan SAL	1.250.000	1.250.000
7	31/03/2019	Bendahara Pengeluaran SKPD A mempertanggungjawabkan UP yang digunakan sebesar Rp. 2.850.000,-. Pada saat yang sama menerima SP2D GU (Ganti Uang) dari BUD sebagai pengganti uang persediaan yang telah digunakan sebesar Rp.2.850.000,- JURNAL FINANSIAL Kas di Bendahara Pengeluaran RK PPKD	2.850.000	2.850.000

No	Tanggal	Uraian	D Rp.	K Rp.
		JURNAL PELAKSANAAN ANGGARAN Tidak Ada		
8	01/04/2019	Dilakukan pembayaran Belanja Pegawai berupa Gaji Pokok dan Tunjangan keluarga dengan SP2D LS sebesar Rp.25.000.000,- yang diterima dari BUD. Atas pembayaran tersebut BUD memotong PPh Pasal 21 atas gaji tersebut sebesar 5% JURNAL FINANSIAL Beban Gaji dan Tunjangan RK PPKD	25.000.000	25.000.000
		JURNAL PELAKSANAAN ANGGARAN Belanja Gaji dan Tunjangan Perubahan SAL	25.000.000	25.000.000
9	05/04/2019	Bendahara Pengeluaran SKPD A menggunakan UP untuk pembayaran perjalanan dinas pegawai sebesar Rp.2.300.000,- JURNAL FINANSIAL Beban Perjalanan Dinas Kas di Bendahara Pengeluaran	2.300.000	2.300.000
		JURNAL PELAKSANAAN ANGGARAN Belanja Perjalanan Dinas Perubahan SAL	2.300.000	2.300.000
10	10/05/2019	SKPD A melakukan perawatan kendaraan dan pemeliharaan gedung. Tagihan yang diterima atas perawatan kendaraan dan pemeliharaan gedung adalah masing-masing Rp.1.200.000,- dan Rp.1.000.000,- JURNAL FINANSIAL Beban Perawatan Kendaraan Bermotor Beban Pemeliharaan Utang Belanja Barang dan Jasa	1.200.000 1.000.000	2.200.000
		JURNAL PELAKSANAAN ANGGARAN Tidak Ada		
11	12/06/2019	Dilakukan pembayaran atas tagihan perawatan kendaraan dan pemeliharaan gedung dengan menggunakan SP2D LS JURNAL FINANSIAL Utang Belanja Barang dan Jasa RK PPKD	2.200.000	2.200.000
		JURNAL PELAKSANAAN ANGGARAN Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Pemeliharaan Perubahan SAL	1.200.000 1.000.000	2.200.000
12	15/07/2019			

No	Tanggal	Uraian	D Rp.	K Rp.
		Dilakukan pengeluaran untuk membeli komputer dengan SP2D LS yang diterima dari BUD sebesar Rp.16.500.000,-. Jumlah tersebut sudah termasuk PPN 10%. BUD memotong PPN 10% dan PPh Pasal 22 sebesar 1.5% JURNAL FINANSIAL Komputer RK PPKD	16.500.000	16.500.000
		JURNAL PELAKSANAAN ANGGARAN Belanja Modal Pengadaan Komputer Perubahan SAL	16.500.000	16.500.000
13	18/08/2019	Dilakukan pengeluaran untuk pembelian Kendaraan Operasional dengan SP2D LS sebesar Rp.55.000.000,-. Jumlah tersebut sudah termasuk PPN 10%. BUD memotong PPN 10% dan PPh Pasal 22 sebesar 1.5% JURNAL FINANSIAL Alat Angkutan Darat Bermotor RK PPKD JURNAL PELAKSANAAN ANGGARAN Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Perubahan SAL	55.000.000 55.000.000	55.000.000 55.000.000
14	20/09/2019	Dibuat Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah untuk masing-masing : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) : Rp.20.000.000,- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) : Rp.10.000.000,- Pajak Penerangan Jalan (PPJ) : Rp.15.000.000,- JURNAL FINANSIAL Piutang Pajak Daerah Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan LO Pendapatan BPHTB LO Pendapatan Pajak Penerangan Jalan LO JURNAL PELAKSANAAN ANGGARAN Tidak Ada	45.000.000	20.000.000 10.000.000 15.000.000
15	10/10/2019	Diterima kas oleh bendahara penerimaan SKPD A dari wajib pajak yang melakukan penghitungan sendiri untuk pembayaran pajak hotel Rp.8.500.000,- dan pajak restoran sebesar Rp.7.500.000,-		
		JURNAL FINANSIAL Kas di Bendahara Penerimaan Pendapatan Pajak Hotel LO	16.000.000	8.500.000

No	Tanggal	Uraian	D Rp.	K Rp.
		Pendapatan Pajak Restoran LO		7.500.000
		JURNAL PELAKSANAAN ANGGARAN Perubahan SAL Pendapatan Pajak Hotel LRA Pendapatan Pajak Restoran LRA	16.000.000	8.500.000 7.500.000
16	11/10/2019	Bendahara penerimaan SKPD A menyetor kas sebesar Rp. 16.000.000,- ke kas daerah yang berasal dari penerimaan pajak sebelumnya. JURNAL FINANSIAL RK PPKD Kas di Bendahara Penerimaan JURNAL PELAKSANAAN ANGGARAN Tidak Ada	16.000.000	16.000.000
17	20/10/2019	Diterima kas sebesar Rp.41.000.000,- oleh Bendahara Penerimaan SKPD A dari Wajib Pajak atas Pajak Daerah yang sudah ditetapkan sebelumnya, dengan rincian : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) : Rp.16.000.000,- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) : Rp.10.000.000,- Pajak Penerangan Jalan (PPJ) : Rp.15.000.000,- JURNAL FINANSIAL Kas di Bendahara Penerimaan Piutang Pajak Daerah	41.000.000	41.000.000
		JURNAL PELAKSANAAN ANGGARAN Perubahan SAL Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan LRA Pendapatan BPHTB LRA Pendapatan Pajak Penerangan Jalan LRA	41.000.000	16.000.000 10.000.000 15.000.000
18	21/10/2019	Bendahara penerimaan SKPD A menyetor kas sebesar Rp. 41.000.000,- ke kas daerah yang berasal dari penerimaan pajak sebelumnya. JURNAL FINANSIAL RK PPKD Kas di Bendahara Penerimaan JURNAL PELAKSANAAN ANGGARAN Tidak Ada	41.000.000	41.000.000
19	05/11/2019	Diterima pembayaran di muka untuk pajak reklame sebesar Rp.7.000.000,-		

No	Tanggal	Uraian	D Rp.	K Rp.
		JURNAL FINANSIAL Kas di Bendahara Penerimaan Pendapatan diterima dimuka lainnya	7.000.000	7.000.000
		JURNAL PELAKSANAAN ANGGARAN Perubahan SAL Pendapatan Pajak Reklame LRA	7.000.000	7.000.000

POSTING KE BUKU BESAR

KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN

Tanggal	Uraian	Ref	D	K	So
01/03/2019	Penerimaan Pajak		3.000.000	-	3.000.000
02/03/2019	Setor ke kas daerah		-	3.000.000	-
10/10/2019	Penerimaan Pajak		16.000.000	-	16.000.000
11/10/2019	Setor ke kas daerah		-	16.000.000	-
20/10/2019	Penerimaan Pajak		41.000.000	-	41.000.000
21/10/2019	Setor ke kas daerah		-	41.000.000	-
05/11/2019	Pajak Reklame		7.000.000	-	7.000.000

KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Tanggal	Uraian	Ref	D	K	So
03/03/2019	SP2D UP		3.000.000	-	3.000.000
09/03/2019	Membayar tagihan utilitas		-	1.600.000	1.400.000
15/03/2019	Pembelian ATK, meterai, isi tabung gas, bahan kebersihan		-	1.250.000	150.000
31/03/2019	SP2D GU		2.850.000	-	3.000.000
05/04/2019	Perjalanan Dinas		-	2.300.000	700.000

PIUTANG PAJAK DAERAH

Tanggal	Uraian	Ref	D	K	So
01/01/2019	Saldo Awal			-	3.000.000
01/03/2019	Penerimaan Pajak		-	3.000.000	-
20/09/2019	SKP		45.000.000	-	45.000.000
20/10/2019	Penerimaan Pajak		-	41.000.000	4.000.000

PERSEDIAAN BAHAN PAKAI HABIS

Tanggal	Uraian	Ref	D	K	So
01/01/2019	Saldo Awal				5.000.000
31/12/2019	Penyesuaian			500.000	4.500.000

TANAH UNTUK BANGUNAN GEDUNG

Tanggal	Uraian	Ref	D	K	So
01/01/2019	Saldo Awal				100.000.000

ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR

Tanggal	Uraian	Ref	D	K	So
01/01/2019	Saldo Awal				42.000.000
18/08/2019	Pengadaan		55.000.000	-	97.000.000

ALAT KANTOR

Tanggal	Uraian	Ref	D	K	So
01/01/2019	Saldo Awal				6.000.000

ALAT RUMAH TANGGA

Tanggal	Uraian	Ref	D	K	So
01/01/2019	Saldo Awal				4.000.000

KOMPUTER

Tanggal	Uraian	Ref	D	K	So
01/01/2019	Saldo Awal				5.000.000
15/07/2019	Pengadaan Komputer		16.500.000		21.500.000

MEJA DAN KURSI KERJA

Tanggal	Uraian	Ref	D	K	So
01/01/2019	Saldo Awal				8.000.000

AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN

Tanggal	Uraian	Ref	D	K	So
01/01/2019	Saldo Awal				(13.000.000)

BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA

Tanggal	Uraian	Ref	D	K	So
01/01/2019	Saldo Awal				150.000.000

BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL

Tanggal	Uraian	Ref	D	K	So
01/01/2019	Saldo Awal				75.000.000

AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN

Tanggal	Uraian	Ref	D	K	So
01/01/2019	Saldo Awal				(22.500.000)

EKUITAS

Tanggal	Uraian	Ref	D	K	So
01/01/2019	Saldo Awal				(362.500.000)

UTANG BELANJA BARANG DAN JASA

Tanggal	Uraian	Ref	D	K	So
08/03/2019	Tagihan Utilitas			1.600.000	(1.600.000)
09/03/2019	Pembayaran Tagihan		1.600.000		-
10/05/2019			-	2.200.000	(2.200.000)
12/06/2019			2.200.000	-	-

PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA LAINNYA

Tanggal	Uraian	Ref	D	K	So
05/11/2019	Uang Muka Reklame			7.000.000	(7.000.000)
31/12/2019	Penyesuaian		4.000.000	-	(3.000.000)

PERUBAHAN SAL

Tanggal	Uraian	Ref	D	K	So
01/03/2019	Penerimaan Pajak Daerah		3.000.000	-	3.000.000
09/03/2019	Pembayaran tagihan utilitas		-	1.600.000	1.400.000
15/03/2019	Pembelian alat tulis kantor		-	1.250.000	150.000
01/04/2019	Belanja Gaji dan tunjangan		-	25.000.000	(24.850.000)
05/04/2019	Belanja Perjalanan Dinas		-	2.300.000	(27.150.000)
12/06/2019	Tagihan perawatan		-	2.200.000	(29.350.000)
15/07/2019	Belanja Modal Pengadaan Komputer		-	16.500.000	(45.850.000)
18/08/2019	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan		-	55.000.000	(100.850.000)
11/10/2019	Pendapatan Pajak		16.000.000	-	(84.850.000)
20/10/2019	Pendapatan Pajak		41.000.000	-	(43.850.000)
20/10/2019	Pendapatan Pajak		7.000.000	-	(36.850.000)

RK PPKD

Tanggal	Uraian	Ref	D	K	So
02/03/2019	Setoran dari SKPD		3.000.000	-	3.000.000
03/03/2019	SP2D UP		-	3.000.000	-
31/03/2019	SP2D GU		-	2.850.000	(2.850.000)
01/04/2019	Gaji		-	25.000.000	(27.850.000)
12/06/2019	Tagihan perawatan		-	2.200.000	(30.050.000)
15/07/2019	Pengadaan Komputer		-	16.500.000	(46.550.000)
18/08/2019	Alat Angkutan		-	55.000.000	(101.550.000)
11/10/2019	Penyetoran dari SKPD		16.000.000	-	(85.550.000)
20/10/2019	Penyetoran dari SKPD		41.000.000	-	(44.550.000)

Pendapatan PBB P2 LRA

Tanggal	Uraian	Ref	D	K	So
01/03/2019	Penerimaan Pajak Daerah			2.000.000	(2.000.000)
20/10/2019	Penerimaan Pajak Daerah			16.000.000	(18.000.000)

Pendapatan Pajak Penerangan Jalan LRA

Tanggal	Uraian	Ref	D	K	So
01/03/2019	Penerimaan Pajak Daerah			1.000.000	(1.000.000)
20/10/2019	Penerimaan Pajak Daerah			15.000.000	(16.000.000)

Pendapatan Pajak Hotel LRA

Tanggal	Uraian	Ref	D	K	So
10/10/2019	Penerimaan Pajak Daerah			8.500.000	(8.500.000)

Pendapatan Pajak Restoran LRA

Tanggal	Uraian	Ref	D	K	So
10/10/2019	Penerimaan Pajak Daerah			7.500.000	(7.500.000)

Pendapatan BPHTB LRA

Tanggal	Uraian	Ref	D	K	So
20/10/2019	Penerimaan Pajak Daerah			10.000.000	(10.000.000)

Pendapatan Pajak Reklame LRA

Tanggal	Uraian	Ref	D	K	So
05/11/2019	Penerimaan Pajak Daerah			7.000.000	(7.000.000)

Belanja Gaji dan Tunjangan

Tanggal	Uraian	Ref	D	K	So
01/04/2019	Gaji dan Tunjangan		25.000.000		25.000.000

Belanja Jasa Kantor

Tanggal	Uraian	Ref	D	K	So
09/03/2019	Tagihan utilitas		1.600.000		1.600.000

Belanja Bahan Pakai Habis

Tanggal	Uraian	Ref	D	K	So
15/03/2019	Pembelian ATK		1.250.000		1.250.000

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

Tanggal	Uraian	Ref	D	K	So
12/06/2019			1.200.000		1.200.000

Belanja Perjalanan Dinas

Tanggal	Uraian	Ref	D	K	So
05/04/2019			2.300.000		2.300.000

Belanja Pemeliharaan Gedung

Tanggal	Uraian	Ref	D	K	So
12/06/2019			1.000.000		1.000.000

Belanja Modal Pengadaan Komputer

Tanggal	Uraian	Ref	D	K	So
15/07/2019			16.500.000		16.500.000

Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor

Tanggal	Uraian	Ref	D	K	So
18/08/2019			55.000.000		55.000.000

Pendapatan Pajak Hotel LO

Tanggal	Uraian	Ref	D	K	So
10/10/2019				8.500.000	(8.500.000)

Pendapatan Pajak Restoran LO

Tanggal	Uraian	Ref	D	K	So
10/10/2019				7.500.000	(7.500.000)

Pendapatan Pajak Penerangan Jalan LO

Tanggal	Uraian	Ref	D	K	So
20/10/2019				15.000.000	(15.000.000)

Pendapatan PBB P2 LO

Tanggal	Uraian	Ref	D	K	So
20/10/2019				20.000.000	(20.000.000)

Pendapatan BPHTB LO

Tanggal	Uraian	Ref	D	K	So
20/10/2019				10.000.000	(10.000.000)

Beban Gaji dan Tunjangan

Tanggal	Uraian	Ref	D	K	So
01/04/2019			25.000.000		25.000.000

Beban Perjalanan Dinas

Tanggal	Uraian	Ref	D	K	So
05/04/2019			2.300.000		2.300.000

Beban Jasa Kantor

Tanggal	Uraian	Ref	D	K	So
08/03/2019	Tagihan utilitas		1.600.000		1.600.000

Beban Bahan Pakai Habis

Tanggal	Uraian	Ref	D	K	So
15/03/2019	Pembelian ATK		1.250.000		1.250.000
31/12/2019	Penyesuaian		500.000		1.750.000

Beban Perawatan Kendaraan Bermotor

Tanggal	Uraian	Ref	D	K	So
10/05/2019			1.200.000		1.200.000

Belanja Pemeliharaan Gedung

Tanggal	Uraian	Ref	D	K	So
10/05/2019			1.000.000		1.000.000

Beban Penyisihan Piutang Pendapatan

Tanggal	Uraian	Ref	D	K	So
31/12/2019	Penyesuaian		200.000		200.000

Penyisihan Piutang Pendapatan

Tanggal	Uraian	Ref	D	K	So
31/12/2019	Penyesuaian			200.000	(200.000)

Beban Penyusutan Peralatan dan mesin

Tanggal	Uraian	Ref	D	K	So
31/12/2019	Penyesuaian		12.000.000		12.000.000

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan mesin

Tanggal	Uraian	Ref	D	K	So
31/12/2019	Penyesuaian			12.000.000	(12.000.000)

Beban Penyusutan Gedung dan bangunan

Tanggal	Uraian	Ref	D	K	So
31/12/2019	Penyesuaian		11.250.000		11.250.000

Akumulasi Penyusutan Gedung dan bangunan

Tanggal	Uraian	Ref	D	K	So
31/12/2019	Penyesuaian			11.250.000	(11.250.000)

Pendapatan Pajak Reklame LO

Tanggal	Uraian	Ref	D	K	So
31/12/2019	Penyesuaian			4.000.000	(4.000.000)

NERACA SALDO SKPD A

Hasil rekaman transaksi pada jurnal diringkas pada buku besar dan dituangkan ke dalam neraca saldo. Neraca saldo merupakan kumpulan dari akun-akun buku besar beserta saldonya. Penyusunan neraca saldo bertujuan untuk menunjukkan apakah rekaman dalam jurnal yang diringkas dalam buku besar bersaldo seimbang antara debit dan kredit.

Berikut ini merupakan Neraca Saldo SKPD A:

NERACA SALDO
SKPD A KABUPATEN CONTOH
31 DESEMBER 2019

AKUN	NERACA SALDO	
Kas di Bendahara Penerimaan	7.000.000	
Kas di Bendahara Pengeluaran	700.000	
Piutang Pajak Daerah	4.000.000	
Persediaan Bahan Pakai Habis	5.000.000	
Tanah untuk Bangunan Gedung	100.000.000	
Alat angkutan darat bermotor	97.000.000	
Alat kantor	6.000.000	
Alat Rumah tangga	4.000.000	
Komputer	21.500.000	
Meja dan kursi kerja	8.000.000	
Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin		13.000.000
Bangunan gedung tempat kerja	150.000.000	
Bangunan gedung tempat tinggal	75.000.000	
Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan		22.500.000
Utang belanja barang dan jasa		-
Pendapatan diterima dimuka lainnya		7.000.000
Ekuitas		362.500.000
Perubahan SAL		36.850.000
RK PPKD		44.550.000
Pendapatan Pajak Hotel LRA		8.500.000
Pendapatan Pajak Restoran LRA		7.500.000
Pendapatan Pajak Reklame LRA		7.000.000
Pendapatan Pajak Penerangan Jalan LRA		16.000.000
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan LRA		18.000.000
Pendapatan BPHTB LRA		10.000.000
Belanja Gaji dan tunjangan	25.000.000	
Belanja jasa kantor	1.600.000	
Belanja bahan pakai habis	1.250.000	
Belanja perawatan kendaraan bermotor	1.200.000	
Belanja perjalanan dinas	2.300.000	
Belanja pemeliharaan	1.000.000	
Belanja modal pengadaan alat angkutan darat bermotor	55.000.000	
Belanja modal pengadaan komputer	16.500.000	
Pendapatan pajak hotel LO		8.500.000
Pendapatan Pajak Restoran LO		7.500.000
Pendapatan Pajak Penerangan Jalan LO		15.000.000
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan LO		20.000.000
Pendapatan BPHTB LO		10.000.000
Beban Gaji dan tunjangan	25.000.000	
Beban jasa kantor	1.600.000	
Beban bahan pakai habis	1.250.000	
Beban perawatan kendaraan bermotor	1.200.000	
Beban perjalanan dinas	2.300.000	
Beban pemeliharaan	1.000.000	
JUMLAH	614.400.000	614.400.000

JURNAL PENYESUAIAN SKPD A

Agar neraca lajur disusun dengan lengkap, maka pada akhir periode harus dibuat jurnal peyesuaian. Jurnal penyesuaian merupakan jurnal untuk mencatat transaksi-transaksi yang pada akhir periode dibutuhkan dibuat agar informasi yang dilaporkan pada laporan keuangan lengkap. Jurnal penyesuaian dibuat sesuai dengan data penyesuaian dan kondisi yang ada pada neraca saldo. Jurnal Penyesuaian yang diperlukan berdasarkan informasi yang ada pada SKPD A adalah sebagai berikut:

	JURNAL PENYESUAIAN	D (Rp.)	K (Rp.)	KETERANGAN	Rp.
1	Beban Bahan Pakai Habis Persediaan Bahan Pakai Habis	500.000	500.000	Persediaan awal Sisa Persediaan Beban	5.000.000 4.500.000 500.000
2	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Penyisihan Piutang Pendapatan	200.000	200.000		
3	Beban Penyusutan Peralatan dan mesin Akm Penyusutan Peralatan dan mesin	12.000.000	12.000.000	a. Alat angkutan darat bermotor b. Alat Kantor c. Alat rumah tangga d. Komputer e. Meja dan kursi	8.200.000 600.000 400.000 2.000.000 800.000 12.000.000
4	Beban Penyusutan Gedung dan bangunan Akm Penyusutan gedung dan bangunan	11.250.000	11.250.000	a. Bangunan gedung tempat kerja b. Bangunan gedung tempat tinggal	7.500.000 3.750.000 11.250.000
5	Pendapatan diterima dimuka lainnya Pendapatan Pajak Reklame LO	4.000.000	4.000.000		

NERACA LAJUR

Neraca lajur adalah kertas kerja yang disusun untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan untuk menyusun laporan keuangan. Neraca lajur sering disebut sebagai kertas kerja (*worksheet*). Dengan kertas kerja yang sudah siap dan benar, maka laporan keuangan dapat disusun. Neraca Lajur SKPD A disajikan sebagai berikut:

NERACA LAJUR
SKPD A KABUPATEN CONTOH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2019

AKUN	NERACA SALDO		PENYESUAIAN		NS DISESUAIKAN		LAPORAN REALISASI ANGGARAN		LAPORAN OPERASIONAL		NERACA	
Kas di Bendahara Penerimaan	7.000.000				7.000.000						7.000.000	
Kas di Bendahara Pengeluaran	700.000				700.000						700.000	
Piutang Pajak Daerah	4.000.000				4.000.000						4.000.000	
Persediaan Bahan Pakai Habis	5.000.000			500.000	4.500.000						4.500.000	
Tanah untuk Bangunan Gedung	100.000.000				100.000.000						100.000.000	
Alat angkutan darat bermotor	97.000.000				97.000.000						97.000.000	
Alat kantor	6.000.000				6.000.000						6.000.000	
Alat Rumah tangga	4.000.000				4.000.000						4.000.000	
Komputer	21.500.000				21.500.000						21.500.000	
Meja dan kursi kerja	8.000.000				8.000.000						8.000.000	
Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin		13.000.000		12.000.000		25.000.000						25.000.000
Bangunan gedung tempat kerja	150.000.000				150.000.000						150.000.000	
Bangunan gedung tempat tinggal	75.000.000				75.000.000						75.000.000	
Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan		22.500.000		11.250.000		33.750.000						33.750.000
Utang belanja barang dan jasa		-				-						-
Pendapatan diterima dimuka lainnya		7.000.000	4.000.000			3.000.000						3.000.000
Ekuitas		362.500.000				362.500.000						362.500.000
Perubahan SAL		36.850.000				36.850.000						36.850.000
RK PPKD		44.550.000				44.550.000						44.550.000
Pendapatan Pajak Hotel LRA		8.500.000				8.500.000	8.500.000					
Pendapatan Pajak Restoran LRA		7.500.000				7.500.000	7.500.000					
Pendapatan Pajak Reklame LRA		7.000.000				7.000.000	7.000.000					
Pendapatan Pajak Penerangan Jalan LRA		16.000.000				16.000.000	16.000.000					
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan LRA		18.000.000				18.000.000	18.000.000					
Pendapatan BPHTB LRA		10.000.000				10.000.000	10.000.000					
Belanja Gaji dan tunjangan	25.000.000				25.000.000		25.000.000					
Belanja jasa kantor	1.600.000				1.600.000		1.600.000					
Belanja bahan pakai habis	1.250.000				1.250.000		1.250.000					
Belanja perawatan kendaraan bermotor	1.200.000				1.200.000		1.200.000					
Belanja perjalanan dinas	2.300.000				2.300.000		2.300.000					
Belanja pemeliharaan	1.000.000				1.000.000		1.000.000					
Belanja modal pengadaan alat angkutan darat bermotor	55.000.000				55.000.000		55.000.000					
Belanja modal pengadaan komputer	16.500.000				16.500.000		16.500.000					
Pendapatan pajak hotel LO		8.500.000				8.500.000			8.500.000			
Pendapatan Pajak Restoran LO		7.500.000				7.500.000			7.500.000			
Pendapatan Pajak Reklame LO			4.000.000			4.000.000			4.000.000			
Pendapatan Pajak Penerangan Jalan LO		15.000.000				15.000.000			15.000.000			
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan LO		20.000.000				20.000.000			20.000.000			
Pendapatan BPHTB LO		10.000.000				10.000.000			10.000.000			
Beban Gaji dan tunjangan	25.000.000				25.000.000	-			25.000.000			
Beban jasa kantor	1.600.000				1.600.000				1.600.000			
Beban bahan pakai habis	1.250.000		500.000		1.750.000				1.750.000			
Beban perawatan kendaraan bermotor	1.200.000				1.200.000				1.200.000			
Beban perjalanan dinas	2.300.000				2.300.000				2.300.000			
Beban pemeliharaan	1.000.000				1.000.000				1.000.000			
Penyisihan piutang pendapatan				200.000		200.000						200.000
Beban penyusutan peralatan dan mesin			12.000.000		12.000.000				12.000.000			
Beban penyusutan gedung dan bangunan			11.250.000		11.250.000				11.250.000			
Beban Penyisihan piutang pendapatan			200.000		200.000				200.000			
JUMLAH	614.400.000	614.400.000	27.950.000	27.950.000	637.850.000	637.850.000	103.850.000	67.000.000	56.300.000	65.000.000	477.700.000	505.850.000
Surplus/Defisit LRA								36.850.000			36.850.000	
Surplus/Defisit LO									8.700.000		8.700.000	
JUMLAH							103.850.000	103.850.000	65.000.000	65.000.000	514.550.000	514.550.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan realisasi anggaran merupakan laporan yang menunjukkan pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan anggaran merupakan pelaksanaan pendapatan LRA, belanja, dan pembiayaan. Unsur yang termuat dalam Laporan realisasi anggaran pada SKPD A tidak ada pembiayaan karena pembiayaan ada pada laporan realisasi anggaran pemerintah daerah.

Laporan realisasi anggaran SKPD A disajikan sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD A KABUPATEN CONTOH UNTUK TAHUN YANG BERKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2019			dalam Rp.
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH			
Pendapatan Pajak Hotel LRA	8.500.000		
Pendapatan Pajak Restoran LRA	7.500.000		
Pendapatan Pajak Reklame LRA	7.000.000		
Pendapatan Pajak Penerangan Jalan LRA	16.000.000		
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan LRA	18.000.000		
Pendapatan BPHTB LRA	<u>10.000.000</u>		
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH		67.000.000	
BELANJA			
BELANJA OPERASI			
Belanja Gaji dan tunjangan	25.000.000		
Belanja jasa kantor	1.600.000		
Belanja bahan pakai habis	1.250.000		
Belanja perawatan kendaraan bermotor	1.200.000		
Belanja perjalanan dinas	2.300.000		
Belanja pemeliharaan	<u>1.000.000</u>		
JUMLAH BELANJA OPERASI		32.350.000	
BELANJA MODAL			
Belanja modal pengadaan alat angkutan darat bermotor	55.000.000		
Belanja modal pengadaan komputer	<u>16.500.000</u>		
JUMLAH BELANJA MODAL		71.500.000	
JUMLAH BELANJA		<u>103.850.000</u>	
SURPLUS/DEFISIT LRA			<u>(36.850.000)</u>

JURNAL PENUTUP PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD A

Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat untuk menutup akun-akun nominal. Jurnal penutup pelaksanaan anggaran merupakan jurnal untuk menutup akun-akun yang ada di laporan realisasi anggaran. Jurnal penutup diperlukan sebelum dilakukan penyusunan neraca. Dasar pemikiran pembuatan jurnal penutup lebih dahulu adalah karena akun surplus/defisit LRA dan perubahan SAL merupakan akun yang pada akhirnya harus masuk ke neraca. Ada 3 (tiga) tahap penutupan pelaksanaan anggaran, yaitu:

- a. Menutup pendapatan LRA dan belanja ke surplus/defisit LRA
- b. Menutup surplus/defisit LRA ke ekuitas SAL
- c. Menutup perubahan SAL ke ekuitas.

Berikut jurnal untuk menutup pelaksanaan anggaran SKPD A:

		D (Rp.)	K (Rp.)
a	Menutup Pendapatan LRA dan belanja ke Surplus/defisit LRA		
	Pendapatan Pajak Hotel LRA	8.500.000	
	Pendapatan Pajak Restoran LRA	7.500.000	
	Pendapatan Pajak Reklame LRA	7.000.000	
	Pendapatan Pajak Penerangan Jalan LRA	16.000.000	
	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	18.000.000	
	Pendapatan BPHTB LRA	10.000.000	
	Surplus/Defisit LRA	36.850.000	
	Belanja Gaji dan tunjangan		25.000.000
	Belanja jasa kantor		1.600.000
	Belanja bahan pakai habis		1.250.000
	Belanja perawatan kendaraan bermotor		1.200.000
	Belanja perjalanan dinas		2.300.000
	Belanja pemeliharaan		1.000.000
	Belanja modal pengadaan alat angkutan darat bermotor		55.000.000
	Belanja modal pengadaan komputer		16.500.000
b	Menutup Surplus/defisit LRA ke Ekuitas SAL		
	Ekuitas SAL	36.850.000	
	Surplus/Defisit LRA		36.850.000
c	Menutup Perubahan SAL ke Ekuitas		
	Perubahan SAL	36.850.000	
	Ekuitas		36.850.000

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan realisasi anggaran tidak cukup untuk menunjukkan kinerja pemerintah karena laporan tersebut hanya memuat penerimaan dan pengeluaran berbentuk kas. Laporan operasional merupakan laporan yang menunjukkan kinerja operasi satuan kerja yang lebih luas karena disusun berdasarkan basis akrual.

Laporan operasional SKPD A disajikan sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL	
SKPD A KABUPATEN CONTOH	
UNTUK TAHUN YANG BERKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2019	
	dalam Rp.
PENDAPATAN	
PENDAPATAN ASLI DAERAH	
Pendapatan pajak hotel LO	8.500.000
Pendapatan Pajak Restoran LO	7.500.000
Pendapatan Pajak Reklame LO	4.000.000
Pendapatan Pajak Penerangan Jalan LO	15.000.000
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan LO	20.000.000
Pendapatan BPHTB LO	<u>10.000.000</u>
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	65.000.000
BEBAN	
BEBAN OPERASI	
Beban Gaji dan tunjangan	25.000.000
Beban jasa kantor	1.600.000
Beban bahan pakai habis	1.750.000
Beban perawatan kendaraan bermotor	1.200.000
Beban perjalanan dinas	2.300.000
Beban pemeliharaan	1.000.000
Beban penyusutan peralatan dan mesin	12.000.000
Beban penyusutan gedung dan bangunan	11.250.000
Beban Penyisihan piutang pendapatan	<u>200.000</u>
JUMLAH BEBAN OPERASI	56.300.000
SURPLUS/DEFISIT LO	8.700.000

JURNAL PENUTUP FINANSIAL SKPD A

Jurnal penutup finansial adalah jurnal yang dibuat untuk menutup akun-akun nominal pada laporan operasional. Akun-akun tersebut meliputi pendapatan LO dan beban. Penutupan finansial diperlukan sebelum dilakukan penyusunan neraca. Berikut ini adalah tahapan penutupan finansial, yaitu:

- a. Menutup pendapatan LO dan beban ke surplus/defisit LO.

b. Menutup surplus/defisit LO ke ekuitas.

Berikut jurnal untuk menutup finansial SKPD A:

		D (Rp.)	K (Rp.)
a	Menutup Pendapatan LO dan belanja ke Surplus/defisit LO		
	Pendapatan pajak hotel LO	8.500.000	
	Pendapatan Pajak Restoran LO	7.500.000	
	Pendapatan Pajak Reklame LO	4.000.000	
	Pendapatan Pajak Penerangan Jalan LO	15.000.000	
	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan LO	20.000.000	
	Pendapatan BPHTB LO	10.000.000	
	SURPLUS/DEFISIT LO		8.700.000
	Beban Gaji dan tunjangan		25.000.000
	Beban jasa kantor		1.600.000
	Beban bahan pakai habis		1.750.000
	Beban perawatan kendaraan bermotor		1.200.000
	Beban perjalanan dinas		2.300.000
	Beban pemeliharaan		1.000.000
	Beban penyusutan peralatan dan mesin		12.000.000
	Beban penyusutan gedung dan bangunan		11.250.000
	Beban Penyisihan piutang pendapatan		200.000
b	Menutup Surplus/defisit LO ke Ekuitas		
	SURPLUS/DEFISIT LO	8.700.000	
	Ekuitas		8.700.000

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang menunjukkan ekuitas awal, perubahan ekuitas, dan ekuitas akhir. Laporan perubahan ekuitas menjadi penghubung

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	
SKPD A KABUPATEN CONTOH	
UNTUK TAHUN YANG BERKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2019	
	dalam Rp.
Ekuitas Awal	362.500.000
Ekuitas	45.550.000
Ekuitas SAL	(36.850.000)
RK PPKD	44.550.000
EKUITAS AKHIR	415.750.000

antara laporan realisasi anggaran dan laporan operasional dengan neraca. Laporan perubahan ekuitas SKPD A disajikan sebagai berikut:

Keterangan:

Ekuitas Awal : dari Saldo Awal Neraca	362.500.000
Ekuitas :	
Kredit akun ekuitas di Jurnal Penutup Pelaksanaan Anggaran	36.850.000
Kredit akun ekuitas di Jurnal Penutup Finansial	<u>8.700.000</u>
	45.550.000
Ekuitas SAL	
Jurnal Penutupan Surplus/Defisit LRA	(36.850.000)
*minus menunjukkan pengurangan ekuitas karena pada Jurnal Penutupan LRA, Akun Ekuitas SAL posisi Debit	
RK PPKD	44.550.000
*Saldo RK PPKD pada neraca lajur	

NERACA

Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan pada suatu tanggal tertentu. Neraca menunjukkan posisi aset, kewajiban dan ekuitas. Neraca SKPD A disajikan sebagai berikut:

NERACA			
SKPD A			
31 Desember 2019			
	Rp.		Rp.
Kas di Bendahara Penerimaan	7.000.000	Kewajiban	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	700.000	Pendapatan diterima dimuka lainr	3.000.000
Piutang Pajak Daerah	4.000.000		
Penyisihan piutang pendapatan	(200.000)		
Persediaan Bahan Pakai Habis	4.500.000	Ekuitas	415.750.000
Tanah untuk Bangunan Gedung	100.000.000		
Alat angkutan darat bermotor	97.000.000		
Alat kantor	6.000.000		
Alat Rumah tangga	4.000.000		
Komputer	21.500.000		
Meja dan kursi kerja	8.000.000		
Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin	(25.000.000)		
Bangunan gedung tempat kerja	150.000.000		
Bangunan gedung tempat tinggal	75.000.000		
Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan	(33.750.000)		
JUMLAH	418.750.000	JUMLAH	418.750.000

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2015) *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta, Indonesia: Erlangga.
- BPK, (2017) Peraturan BPK nomor 1 tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Jakarta.
- Halim, A. (2016) *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- KSAP. (2021) Standar Akuntansi Pemerintahan, <http://www.ksap.org/sap/standar-akuntansi-pemerintahan/> (diakses 14 Juni 2022).
- Kusmayadi, Dwi Harti. (2018) *Praktikum Akuntansi Lembaga/Instansi Pemerintah untuk SMK/MAK kelas XI*, Erlangga.
- Mahsun, M., Sulistiyowati, F., & Purwanugraha, H. A. (2016) *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM.
- Mardiasmo. (2018) *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi.
- Nordiawan, Dedi. (2010) *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi 2, Jakarta, Salemba Empat.
- Nordiawan, Dedi., Iswahyudi, S.P, Maulidah, R. (2007) *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta, Salemba Empat.
- Republik Indonesia. (2010) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Siregar, B. (2015) *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.